

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 21.a TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021-2022

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 - 2022

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
<b>I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH</b>							
<p>1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah, seperti upaya untuk memasukan pokok-pokok pikiran/aspirasi hasil reses oleh pihak legislatif setelah proses KUA PPAS selesai, usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, deal/ kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif atas usulan kegiatan.</p> <p>Aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD yang dikembangkan Kemendagri masih belum dapat diimplementasikan</p>	<p>1. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan pelaporan.</p>	<p>1. Melakukan mitigasi risiko kendala implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LO), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah</p>	<p>Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan dan akuntabel.</p>	<p>1) B07 : Tersusunnya inventarisasi permasalahan implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p>	<p>1) B03 : Tersusunnya inventarisasi permasalahan implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p>	Laporan
		<p>2) B07 : Implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan yang realistis untuk diimplementasikan</p>			<p>2) B03 : Implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan yang realistis untuk diimplementasikan</p>	Laporan	
		<p>3) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan penatausahaan yang diimplementasikan sebagai pertimbangan implementasi Tahun 2022</p>			<p>3) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i></p>	Laporan	
			<p>1. Mengintegrasikan sistem <i>e-planning</i> dan sistem <i>e-budgeting</i> dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</p>		<p>Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (<i>e-budgeting</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.</p>	<p>1) B06 : Progres pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan sistem <i>e-budgeting</i> dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</p>	<p>1) B03 : Progres pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan sistem <i>e-budgeting</i> dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</p>
<p>2) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan sistem <i>e-budgeting</i> dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</p>			<p>2) B06 : Progres pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan sistem <i>e-budgeting</i> dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</p>			Laporan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					3) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Infomasi Rencana Umum Pengadaan	3) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Infomasi Rencana Umum Pengadaan	Laporan
					4) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Infomasi Rencana Umum Pengadaan	4) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Infomasi Rencana Umum Pengadaan	Laporan
	2. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik ( <i>e-planning</i> ) dan <i>e-budgeting</i>	1. Melaksanakan Workshop Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Daerah	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi beserta Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya	1) B06 : Penetapan Standar Satuan Harga Tahun 2022	1) B06 : Penetapan Standar Satuan Harga Tahun 2023	Laporan
2) B06 : Progres integrasi Standar Satuan Harga ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting					2) B06 : Progres integrasi Standar Satuan Harga ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting	Laporan	
3) B09 : Penetapan Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2022					3) B09 : Penetapan Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2023	Laporan	
4) B10 : Progres integrasi Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting					4) B10 : Progres integrasi Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan L23 ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting	Laporan	
5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting					5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	Laporan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
2. APBD belum transparan bagi masyarakat	Menginformasikan APBD kepada masyarakat	3. Melakukan evaluasi atas Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Berjalan	Inspektorat Daerah (LO), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait lainnya	Terpublikasinya ringkasan eksekutif APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B06 : Reviu Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2021	1) B06 : Reviu Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2022	Laporan Hasil Reviu
		4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Inspektorat Daerah (LO), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait lainnya		1) B12 : Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022	1) B12 : Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	Laporan Hasil Reviu
		Mempublikasikan ringkasan eksekutif APBD melalui website Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1) B03: Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03: Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	Laporan
3. Ketepatan waktu Penetapan APBD Tahun Berikutnya belum dapat dipastikan	Melaksanakan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kemendagri	Melakukan koordinasi baik internal Pemerintah Daerah, legislatif, maupun masyarakat tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LO), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	1) B12: Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu	1) B12: Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2023 tepat waktu	Dokumen Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tepat Waktu
<b>II. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							
1. Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (legislatif, swasta).	1. Mendorong kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1. Membentuk Unit Layanan Pengadaan yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Terwujudnya Unit Layanan Pengadaan yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1) B03 : Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja Unit Layanan Pengadaan (Permanen)	1) B03 : Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja Unit Layanan Pengadaan (Permanen)	Keputusan Wali Kota
		2. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa			2) B12 : Meningkatnya tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan dan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatnya tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan dan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari tingkat dan standar yang ada saat ini	
				Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Penambahan Fungsional UKPengadaan Barang/Jasa

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
2. Unit Layanan Pengadaan belum bekerja secara optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1. Mendorong Unit Layanan Pengadaan untuk bekerja lebih optimal dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan serta mengimplementasikan manajemen risiko	1. Melaksanakan revidi atas rencana pengadaan (revidi metode lelang, konsolidasi, penayangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dari masing-masing OPD	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat Daerah dan seluruh OPD	Terlaksananya revidi atas rencana pengadaan (revidi pemaketan, konsolidasi, penayangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	1) B02: Rencana Umum Pengadaan sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02: Rencana Umum Pengadaan sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	Laporan Penayangan Rencana Umum Pengadaan
					2) B03: Laporan hasil revidi perencanaan pengadaan	2) B03: Laporan hasil revidi perencanaan pengadaan	Laporan Revidi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
				Tersedianya Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko dari hasil pelaksanaan revidi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	1) B02: Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko Tahun 2021	1) B02: Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko Tahun 2021	Data Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko
					2) B03: Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021	2) B03: Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021	Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021
		2. Menyusun Standar Operasional Prosedur, Kode Etik, dan Manajemen yang diperlukan terkait proses pengadaan barang dan jasa		1) B.12 : Standar Operasional Prosedur, Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Risiko		Peraturan Wali Kota	
				2) B12: Laporan implementasi Standar Operasional Prosedur, Kode Etik, dan Manajemen risiko	2) B12: Laporan implementasi Standar Operasional Prosedur, Kode Etik, dan Manajemen risiko	Laporan	
				Terlaksananya evaluasi Pengadaan Barang/Jasa per triwulan	3) B03 : Laporan hasil revidi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	3) B03 : Laporan hasil revidi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan hasil revidi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
					4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
					5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
					6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
		Tersedianya Vendor Management System	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	Laporan		

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					2). B12: Tersedianya Vendor Management System yang sudah diimplementasikan oleh seluruh OPD	2). B12: Tersedianya Vendor Management System yang sudah diimplementasikan oleh seluruh OPD	Laporan Implementasi Vendor Management System
	2. Mendorong inspektorat untuk menyusun konsep pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1. Inspektorat melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri atas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko	Inspektorat Daerah (LO), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan OPD terkait	Terlaksananya Reviu Harga Perkiraan Sendiri pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko	1) B03 : Terlaksananya Reviu Harga Perkiraan Sendiri pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko	1) B03 : Terlaksananya Reviu HPS pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis dan Berisiko	Laporan
		2. Inspektorat melaksanakan reviu kinerja UKPengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa	Inspektorat Daerah (LO) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya reviu kinerja UKPengadaan Barang/Jasa terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12 : Terlaksananya reviu kinerja terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12 : Terlaksananya reviu kinerja terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan reviu kinerja
3. Grading single salary Pokja Unit Layanan Pengadaan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko kerja dalam rangka pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	1. Melakukan penyesuaian grading untuk Pokja Unit Layanan Pengadaan	1. Mengusulkan penyesuaian grading untuk Pokja Unit Layanan Pengadaan berbasis kinerja dan risiko	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Peningkatan grading single salary Pokja Unit Layanan Pengadaan berbasis kinerja dan risiko	1) B01 : Penetapan keputusan peningkatan grading single salary Pokja Unit Layanan Pengadaan berbasis kinerja dan risiko		Keputusan grading single salary Pokja Unit Layanan Pengadaan berbasis kinerja dan risiko
<b>III. PERIZINAN</b>							
1. Belum adanya regulasi yang diperlukan terkait penerbitan perizinan dan nonperizinan	1. Pemerintah Daerah menyusun regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel	1. Menyusun regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, OPD terkait lainnya	Terbentuknya regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel	1) B12: Rekomendasi Gubernur atas Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang	B03: Tersedianya Peraturan Daerah/ Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang Wilayah	Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
					2) B12: Peraturan Wali Kota tentang Perizinan Terintegrasi		Peraturan Wali Kota Perizinan Terintegrasi
					3) B08: Peraturan Wali Kota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah		Peraturan Wali Kota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
					4) B12: Keputusan Wali Kota Perizinan Terintegrasi, Kode Etik dan Tim Teknis		Keputusan Wali Kota tentang Perizinan Terintegrasi, Kode Etik, dan Tim Teknis

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
2. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan.	1. Pendelegasian seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari unsur SKPD teknis	1) B12 : Terdapat sekretariat tim teknis perizinan	1) B12 : Peningkatan prasarana dan sarana sekretariat tim teknis perizinan	Keputusan Wali Kota tentang Tim, Ruang Sekretariat Tim Teknis Perizinan
	2. Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan (e-Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1. Melakukan kajian terhadap fitur-fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO)	Terimplementasikannya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis teknologi informasi (e-Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1) B12: Tersedia aplikasi perizinan di daerah yang sudah dikembangkan dengan fitur: tax clearance, tracking system, dan e-signature	B12: Tersedia aplikasi perizinan di daerah yang sudah dikembangkan dengan fitur: tax clearance, tracking system, dan e-signature	Laporan
					2)	B12: MoU Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam rangka implementasi tax clearance provinsi dengan kabupaten/ kota	Laporan
					2) B12: Implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature	2) B12: Implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature	Laporan implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature
3. Kurang memadainya alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan prasarana dan sarana menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prima	1. Mengajukan usulan anggaran prasarana dan sarana termasuk pembiayaan operasional Survei lapangan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya pagu anggaran untuk peningkatan prasarana dan sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) B06 : Mengajukan usulan pagu anggaran perubahan Tahun 2021	1) B06 : Mengajukan usulan pagu anggaran perubahan Tahun 2022	Usulan pagu anggaran perubahan
					2) B11 : Pagu anggaran perubahan Tahun 2021 ditetapkan	2) B11 : Pagu anggaran perubahan Tahun 2022 ditetapkan	Penetapan pagu anggaran perubahan
4. Pelayanan masyarakat kurang optimal	1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan	1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO)	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang baik	1) B12 : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Indeks yang baik	1) B12 : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan dengan Indeks yang baik	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
					2) B12 : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Indeks yang baik	2) B12 : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan dengan Indeks yang baik	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat		Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	3) B12 : Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat	2) B12 : Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
4. <i>Grading single salary</i> pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko kerja dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan	1. Melakukan penyesuaian grading untuk pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengusulkan penyesuaian grading untuk pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Peningkatan grading single salary pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1) B12 : Penetapan keputusan peningkatan grading single salary pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Keputusan grading single salary pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan terkait penerbitan perizinan dan nonperizinan	1. Inspektorat melakukan reviu kinerja proses penerbitan perizinan dan non perizinan	1. Inspektorat melaksanakan reviu kinerja terkait proses penerbitan perizinan dan non perizinan	Inspektorat Daerah (LO), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LO)	Terlaksananya reviu kinerja penerbitan perizinan dan non perizinan	1) B12: Laporan hasil reviu kinerja terkait penerbitan perizinan dan non perizinan	1) B12: Laporan hasil reviu kinerja terkait penerbitan perizinan dan non perizinan	Laporan reviu kinerja

#### IV. PENGAWASAN APIP

1. Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah ( <i>assurance activities</i> ), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah ( <i>anti corruption activities</i> ); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah ( <i>consulting activities</i> ).	1. Melakukan penguatan kelembagaan Inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan ( <i>pre</i> ), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan penatausahaan keuangan paska kegiatan selesai ( <i>post</i> ).	1. Penguatan peran, kedudukan dan <i>mindset</i> Inspektorat terhadap SKPD.	Inspektorat Daerah (LO), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja APIP	1) B09: Penyediaan Sumber Daya Manusia APIP sesuai kecukupan	1) B09: Penyediaan Sumber Daya Manusia APIP sesuai kecukupan	Dokumen penghitungan kecukupan Sumber Daya Manusia APIP
				Tersedianya anggaran APIP yang mencukupi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Kemendagri	1) B01: Ketersediaan anggaran APIP Tahun 2021 sesuai dengan regulasi	1) B01: Ketersediaan anggaran APIP Tahun 2022 sesuai dengan regulasi	Dokumen penghitungan kecukupan anggaran APIP
					2) B09: Pengajuan kebutuhan anggaran APIP Tahun 2022 sesuai dengan regulasi	2) B09: Pengajuan kebutuhan anggaran APIP Tahun 2023 sesuai dengan regulasi	Dokumen pengajuan anggaran APIP sesuai regulasi
				Meningkatnya kapabilitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat yang ditunjukkan dengan meningkatnya level kapabilitas dari level yang ada saat ini.	B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3	B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3	Dokumen penyediaan infrastruktur
					2) B06 : Evaluasi ( <i>Self Assesment</i> ) APIP berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	2) B06 : Evaluasi ( <i>Self Assesment</i> ) APIP berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	Laporan hasil <i>self-assessment</i>
					3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendapatkan APIP berlevel 3	3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendapatkan APIP berlevel 3	Laporan hasil evaluasi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
	2. Meningkatkan kapasitas Inspektorat baik dari segi kompetensi maupun Sumber Daya Manusia.	1. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif, in house training, dan penjurangan jabatan secara berkala.	Inspektorat Daerah (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia APIP	1) B12 : Meningkatkan Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjurangan jabatan	1) B12 : Meningkatkan Jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, In House Training, sertifikasi pembentukan dan penjurangan jabatan	Data APIP beserta pelatihan yang diikuti selama 1 tahun
		2. Mengimplementasikan Whistle Blower System	Inspektorat Daerah	Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat	1) B03: Menyusun saluran Whistleblowing System		Dokumen Saluran Whistleblowing System
					2) B06: Sosialisasi saluran Whistleblowing System	2) B06: Sosialisasi saluran Whistleblowing System	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi
					3) B12: Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat	3) B12: Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		4) B12: Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	4) B12: Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat			
4. Melaksanakan <i>Probity Audit</i>	Inspektorat Daerah (LO), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan OPD terkait	Terlaksananya Probity Audit	1) B12: Laporan Hasil Probity Audit	1) B12: Laporan Hasil Probity Audit	5 Laporan Probity Audit		
3. Melakukan Audit Investigasi/ Pemeriksaan Khusus	Inspektorat Daerah	Terlaksananya Audit Investigasi/ Pemeriksaan Khusus	1) B12 : Laporan Hasil Audit Investigasi/ Pemeriksaan Khusus	1) B12 : Laporan Hasil Audit Investigasi/ Pemeriksaan Khusus	5 Laporan Hasil Audit Investigasi/ Pemeriksaan Khusus		
3. Meningkatkan Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baik Internal maupun Eksternal	1. Meningkatkan progress tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal	Inspektorat Daaerah dan OPD terkait	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	1) B12: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	1) B12: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	
2. Masih rendahnya tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	4. Meningkatkan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3	Inspektorat Daerah (LO), dan Dinas Teknis Terkait	Meningkatnya level kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari level yang ada saat ini	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan pelaksanaan Bimtek
					2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3	2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3	Dokumen pemenuhan unsur
					3) B07: Self Assesment pemenuhan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	3) B07: Self Assesment pemenuhan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berlevel 3 dan perbaikkan infrastruktur yang diperlukan	Laporan



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					4) B08: Reviu hasil Self Assesment oleh Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendapatkan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3	4) B08: Reviu hasil Self Assesment oleh Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendapatkan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3	Laporan
					5) B10: Quality assurance atas hasil reviu kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3	5) B10: Quality assurance atas hasil reviu kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3	Laporan
<b>V. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>							
1. Belum adanya regulasi manajemen ASN pada Pemerintah Daerah	1. Menyusun regulasi Manajemen ASN	1. Menyusun regulasi Manajemen ASN yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LO), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan dan implementasi Peraturan Wali Kota tentang Manajemen ASN	1) B03: Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi Jabatan		Peraturan Wali Kota tentang Manajemen ASN
					6) B06: Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana)		Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Adiministratif, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana)
					7)	B09: Peraturan Wali Kota tentang Pedoman manajemen talenta	Peraturan Wali Kota tentang Pedoman manajemen talenta
					8)	B12: Peraturan Wali Kota tentang Sistem pola karir/Pembinaan Karir	Peraturan Wali Kota tentang Sistem pola karir/Pembinaan Karir
					9) B09: Peraturan Wali Kota tentang Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi		Peraturan Wali Kota tentang Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					10)	B12: Peraturan Wali Kota tentang Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana suksesi	Peraturan Wali Kota tentang Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana suksesi
		2. Menyusun Keputusan Wali Kota tentang: a. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk tahun berjalan b. Pembentukan Unit Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara c. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi d. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.	BKD (LO), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya Keputusan Wali Kota tentang: 1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk tahun berjalan 2. Pembentukan Unit Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi 4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.	1) B01: Keputusan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 2) B12: Keputusan Wali Kota tentang Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Eksekutif dan Legislatif 4) B03: Keputusan Wali Kota tentang Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	B01: Keputusan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Keputusan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Keputusan Wali Kota tentang Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Eksekutif dan Legislatif Keputusan Wali Kota tentang Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
2. Belum dilakukan dan diimplementasikannya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagai dasar penempatan Sumber Daya Manusia ke dalam jabatan dan sebagai indikator dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.	1. Melakukan pembenahan dalam penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Melakukan penghitungan skor evaluasi jabatan dalam rangka perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya: (1). Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan; (2). Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD; (3). Peta Jabatan seluruh OPD; (4). Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPANRB; (5). Surat Persetujuan Evaluasi Jabatan	1) B12 : (1). Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan; (2). Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD; (3). Peta Jabatan seluruh OPD; 2) B12: Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPANRB		Rekapitulasi Surat
				Implementasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan dan memperhatikan risiko	1) B03: Surat Persetujuan Kemendagri terkait Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai	1) B03: Surat Persetujuan Kemendagri terkait Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai	Surat

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					2) B12: Laporan yang menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, risiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dan seterusnya serta pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN dengan memperhatikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam pemberian/ pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai	2) B12: Laporan yang menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, risiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dan seterusnya serta pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN dengan memperhatikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam pemberian/ pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai	Laporan
3. Belum adanya pengukuran tingkat disiplin dan kinerja pegawai yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	1. Menyusun Sistem Informasi Kepegawaian dan melaksanakan pembenahan dalam penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Menyusun Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LO), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Unit Layanan Pengadaan	Terimplementasikannya Manajemen Sumber Daya Manusia yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1) B12: Laporan Implementasi Absensi Elektronik	1) B12: Laporan Implementasi Absensi Elektronik	Laporan
					2) B12: Laporan implementasi aplikasi penilaian kinerja yang memenuhi: (a). Pelaporan harian; (b). Verifikasi; (c) Pengukuran kinerja	2) B12: Laporan implementasi aplikasi penilaian kinerja yang memenuhi: (a). Pelaporan harian; (b). Verifikasi; (c) Pengukuran kinerja	Laporan
					3) B12: Laporan Integrasi aplikasi absensi elektronik dan penilaian kinerja pegawai	3) B12: Laporan Integrasi aplikasi absensi elektronik dan penilaian kinerja pegawai	Laporan
4. Proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah belum dapat diyakini apakah sudah berjalan dengan	1. Melaksanakan proses rekrutmen, promosi, rotasi, dan mutasi ASN secara terbuka dan akuntabel	1. Melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LO),	Terlaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	1) B12: Laporan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	1) B12: Laporan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
akuntabel	2. Melaksanakan pengawasan terhadap proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah	1. Melaksanakan revidu atas pelaksanaan proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah(LO), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Laporan pelaksanaan revidu atas proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah	1) B12: Laporan pelaksanaan revidu atas proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN	1) B12: Laporan pelaksanaan revidu atas proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN	Laporan
	3. Mengimplementasikan Manajemen Kinerja	1. Melaksanakan penilaian kinerja, baik level individu maupun organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu dan organisasi	1) B12: Laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu dan organisasi	1) B12: Laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu dan organisasi	Laporan
5. Belum ada evaluasi atas potensi Benturan Kepentingan	1. Mengimplementasikan Evaluasi Benturan Kepentingan	1. Melaksanakan sosialisasi regulasi Benturan Kepentingan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LO), Inspektorat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan	1) B06: Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan	1) B06: Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan	Laporan
		2. Melakukan evaluasi Benturan Kepentingan	Inspektorat Daerah (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	1) B12: Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	1) B12: Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Laporan
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	1. Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi.	1. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah (LO), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Terbangun dan berfungsinya Sistem Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemerintah Daerah	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemerintah Daerah	Laporan
		2. Monitoring dan evaluasi atas implementasi Pengendalian Gratifikasi			2) B12 : Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	2) B12 : Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	Laporan
<b>VI. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH</b>							
1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dan lain-lain.	1. Membangun Database Wajib Pajak Daerah dan Kewajiban Yang Harus Dibayarkan	1. Penyempurnaan Data dan Informasi Terkait Pajak Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait	Terbentuknya Database Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	Laporan Pendataan Wajib Pajak
					2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Potensi Wajib Pajak
					3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Konsolidasi Data Pajak dan Potensi
					4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	Laporan Penggunaan Database Wajib Pajak

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
	2. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah	1. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Terutang	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terbayarkannya Semua Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Permasalahan
			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait		2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban wajib pajak daerah	2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban wajib pajak daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi
			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	Laporan Penagihan
			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait		4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	Laporan Hasil Evaluasi Pembayaran Kewajiban
			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait		5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	Laporan Pemberian Sanksi
	3. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi	1. Perbaikan Sistem Tata Kelola Pajak Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait	Reviu Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sistem Data dan Informasi	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	Laporan Harmonisasi Kebijakan Pajak Daerah
					2) B09: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	2) B09: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	Laporan Reviu Kelembagaan Pajak Daerah
			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Dinas Teknis Terkait		3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	Laporan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
					4) B12: Terlaksananya tax-clearance melalui Koneksi Host-to-Host antara: a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan DJP c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan BPN (BPHTB Clearance)	4) B12: Terlaksananya tax-clearance melalui Koneksi Host-to-Host antara: a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan DJP b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan BPN (BPHTB Clearance)	Laporan Koneksi Sistem Pajak Daerah

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
2. Pengelolaan pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal.	1. Melakukan upaya-upaya inovasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.	1. Melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Inspektorat Daerah, OPD terkait lainnya	Meningkatnya pajak daerah.	1) B03: Usulan Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah	1) B03: Usulan Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah	Surat Usulan Inovasi
					2) B12: Laporan Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah	2) B12: Laporan Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah	Laporan
	2. Melakukan upaya-upaya dalam mencapai target pajak daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam mencapai target pajak daerah	Tercapainya target pajak daerah	1) B03: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	1) B03: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	1) B03: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	Laporan
					2) B06: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	2) B06: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	Laporan
					3) B09: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	3) B09: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	Laporan
					4) B12: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	4) B12: Laporan evaluasi atas capaian pajak daerah	Laporan
	3. Melakukan upaya penagihan tunggakan pajak daerah	1. Melakukan upaya penagihan tunggakan pajak daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Inspektorat Daerah, OPD terkait lainnya	Tercapainya target penagihan tunggakan pajak daerah	1) B03: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	1) B03: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	Laporan
					2) B06: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	2) B06: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	Laporan
					3) B09: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	3) B09: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	Laporan
					4) B12: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	4) B12: Laporan evaluasi atas capaian penagihan tunggakan pajak daerah	Laporan
<b>VII. MANAJEMEN ASET DAERAH</b>							
1. Database dan/atau informasi aset daerah belum valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum terintegrasinya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan.	1. Melakukan pembenahan manajemen aset daerah.	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalam rangka inventarisasi dan updating data aset daerah, identifikasi permasalahan aset daerah.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	1) B03: Laporan Pelaksanaan Rakor Barang Milik Daerah	1) B03: Laporan Pelaksanaan Rakor Barang Milik Daerah	Laporan
					2) B06 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi	2) B06 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi	Laporan
					3) B12 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi	3) B12 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi	Laporan
	2. Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1. Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	Terintegrasinya sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1) B09 : Implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	1) B06 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)	
					2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan	
2. Regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum tersedia dan/ atau belum memadai	1. Menyusun dan memastikan penguatan regulasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Menyusun dan melakukan evaluasi atas regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Bagian Hukum, OPD terkait lainnya	Tersedianya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		1) B06: Peraturan Daerah tentang Penguatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Peraturan Daerah	
						2) B03: Peraturan Wali Kota tentang Penguatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Peraturan Wali Kota	
						3) B03: Keputusan Wali Kota tentang Penguatan Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Keputusan Wali Kota	
					4) B12: Laporan Evaluasi dan Penguatan Regulasi Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	4) B12: Laporan Evaluasi dan Penguatan Regulasi Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Laporan	
3. Banyaknya aset daerah yang bermasalah karena upaya pengamanan aset yang tidak optimal	1. Pemerintah Daerah memproses sertifikasi aset	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka sertifikasi aset sebagai upaya pengamanan aset daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), OPD terkait sertifikasi aset	Peningkatan aset bersertifikat per tahun	1) B03: Laporan capaian sertifikasi aset	1) B03: Laporan capaian sertifikasi aset	Laporan	
					2) B06: Laporan capaian sertifikasi aset	2) B06: Laporan capaian sertifikasi aset	Laporan	
					3) B09: Laporan capaian sertifikasi aset	3) B09: Laporan capaian sertifikasi aset	Laporan	
					4) B12: Laporan capaian sertifikasi aset	4) B12: Laporan capaian sertifikasi aset	Laporan	
	2. Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban dan penyelamatan aset daerah	1. Melaksanakan penyelesaian aset aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (LO), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, OPD terkait lainnya	Terselesaikannya aset bermasalah		1) B03: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	1) B03: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	Laporan
						2) B06: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	2) B06: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	Laporan
						3) B09: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	3) B09: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	Laporan
						4) B12: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	4) B12: Laporan Penertiban/ Pemulihan Aset	Laporan
	2. Melaksanakan upaya-upaya penagihan kewajiban pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pengebang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LO), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian	Terlaksananya penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang merupakan kewajiban Pengebang		1) B03: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1) B03: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Laporan	
					2) B06: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	2) B06: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Laporan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
			Hukum, OPD terkait lainnya		3) B09: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 4) B12: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	3) B09: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 4) B12: Laporan Penagihan/ Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Laporan Laporan
4. Pengawasan Barang Milik Daerah tidak dilakukan dengan optimal	1. Inspektorat melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Inspektorat melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Daerah	Inspektorat Daerah (LO), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait	Terlaksananya reviu Inspektorat terkait kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1) B12: Laporan hasil reviu Inspektorat terkait kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1) B12: Laporan hasil reviu Inspektorat terkait kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
<b>VIII. TATA KELOLA KEUANGAN DESA</b>							
2. Pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	1. Publikasi APBDes dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	1. Mempublikasikan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Kepala Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait	Terpublikasinya APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	1) B03: Publikasi APBDes 2021 pada seluruh desa	1) B03: Publikasi APBDes 2022 pada seluruh desa	Laporan Publikasi
					2) B03: Publikasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2020 pada seluruh Desa	2) B03: Publikasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021 pada seluruh Desa	Laporan Publikasi
	4. Implementasi Audit Keuangan Desa Berbasis risiko	1. Mengimplementasikan audit berbasis risiko atas tata kelola keuangan desa	Inspektorat Daerah (LO), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait	Terimplementasinya pengawasan berbasis risiko atas tata kelola keuangan desa	1) B12: Laporan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa	1) B12: Laporan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa	Laporan
	5. Pengawasan Keuangan Desa melalui Pengaduan Masyarakat	1. Melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	Inspektorat Daerah (LO), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait	Terlaksananya Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	1) B03: Laporan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	1) B03: Laporan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	Laporan



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
		2. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat Daerah (LO), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, OPD terkait	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	1) B12: Laporan penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	1) B12: Laporan penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa	Laporan

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH